

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pelaporan keuangan pada Organisasi Sektor Publik saat ini ditandai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan di pemerintah pusat ataupun daerah. Akuntabilitas merupakan upaya pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sejak awal yang dievaluasi secara periodik (Mardiasmo, 2009). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap tuntutan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran. PP No.8 tahun 2006 menjelaskan jika laporan keuangan merupakan upaya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah sepanjang satu periode.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dilihat berkualitas baik pada saat sudah mendapatkan penilaian dari Supreme Audit Board (BPK RI) setiap tahunnya. Pada saat menyusun Laporan Keuangan, pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (bermutu). Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang ada pada laporan keuangan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pemakainya, yang berarti bahwa laporan keuangan itu bebas dari kecurangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat diandalkan. Gemara (2023), keuangan

dapat dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan oleh entitas dalam laporan keuangan memiliki empat syarat yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami PP N0 71 Tahun 2010. Dikatakan Relevansi apabila informasi dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, Zuca et.al dalam penelitian Pangaribuan (2022).

Pengelolaan keuangan daerah yaitu seluruh kegiatan yang dimulai dari bagian Perencanaan (planning), pengerjaan, penataan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah yang sudah diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan PP N0 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari 7 pelaporan keuangan yaitu: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3. Neraca, 4. Laporan Operasional (LO), 5. Laporan Arus Kas, 6. Laporan Perubahan Ekuitas dan, 7. Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CLAK). Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam azas umum pengelolaan keuangan daerah wajib dikelola secara tertib dengan mematuhi peraturan Perundang-undangan yang efisien, efektif, ekonomi, transparan dan bertanggungjawab untuk memperhatikan azas keadilan yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Adapun yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai

dengan tujuan yang diinginkan. Pengawasan keuangan daerah menjadi aktivitas terencana yang bertujuan memberi jaminan supaya tata kelola keuangan terlaksana sesuai undang undang dalam pelaksanaan kerangka pemerintahan Hartoyo dalam Loemau (2022). Jadi pengawasan berarti menghindari dari potensi penyimpangan terhadap tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan ini, setidaknya bisa membantu melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan untuk memperoleh tujuan yang efektif maupun efisien. Dengan adanya pengawasan maka bisa menciptakan kegiatan berkaitan penetapan pengevaluasian yaitu seberapa jauh pekerjaan itu terlaksana dan seberapa jauh juga penyelewengan yang terjadi selama pekerjaan itu berlangsung. Dalam hal ini artinya pengawasan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

Peneliti sebelumnya dengan judul penelitian “ Pengaruh Transparansi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Rahayu (2022). Menjelaskan bahwa Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah ditetapkan. Melalui hal ini maka pemerintah bisa menjamin pengawasan keuangan daerah berjalan secara efektif dan efisien dengan ketentuan yang telah direncanakan sehingga memberikan keyakinan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selanjutnya penelitian Asiah (2019) berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah” menjelaskan dengan adanya pengawasan terhadap proses kegiatan akuntansi dan keuangan maka akan tercipta laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini berarti apabila pengawasan keuangan daerah meningkat maka kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah juga akan meningkat. Selanjutnya penelitian berjudul Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan, Iqbal (2022), Menjelaskan bahwa tujuan utama pengawasan tidak hanya sekedar menemukan kesalahan tetapi terarah ke penyelenggaraan kegiatan agar rencana yang ditentukan sesuai dan terlaksana secara optimal. Dalam hal ini berarti dengan adanya pengawasan keuangan daerah yang baik maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan yang berkualitas juga dapat dicapai dengan teknologi informasi.

Menurut Puspita (2017) dalam penelitian Aldino & Septiano (2021) Teknologi informasi mempunyai peran yang besar untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas. Teknologi informasi berfungsi sebagai pemrosesan, penyimpanan informasi, dan penyebaran informasi. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Mempertimbangkan peran penting sumber daya, Resource-Based Theory (Barney 1991) mendukung anggapan bahwa Modal Manusia dan Modal Fisik menyediakan sumber daya yang signifikan untuk menjaga Kualitas laporan Keuangan. Human Capital terkait dengan segala pengetahuan, keterampilan,

kemampuan, dan sikap yang dimiliki oleh personel dalam organisasi yang sangat mendukung keberhasilan organisasi. Perrotta (2018) dalam penelitian Usman, et.al (2021) Mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia menciptakan nilai tambahan bagi organisasi setiap hari melalui motivasi, komitmen, kompetensi, dan efektivitas kerja sama tim.

Instansi pemerintah wajib membuat laporan keuangan, salah satunya yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam riset ini peneliti menyelidiki secara luas terhadap salah satu kota / kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yaitu di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dilansir dari berita online (inilahmedan.com) dalam penyajian laporan keuangan, BPK masih banyak menemukan penyimpangan. Dalam IHPD tahun 2019 BPK mengungkapkan khususnya LKPD Deli Serdang adanya realisasi belanja pemeliharaan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan senilai Rp 809,78 juta dan belanja kegiatan sosialisasi perda Anggota DPRD tidak didukung SPJ yang sah senilai Rp4.005,26 juta. Kemudian IHPD tahun 2020 BPK juga mengungkapkan adanya pencatatan aset tetap tidak tertib, perencanaan tidak memadai, barang hasil pengadaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak ditemukan senilai Rp290 juta, kegiatan pencegahan Covid-19 tidak diakomodasi dengan jaminan yang lengkap senilai Rp341 juta dan biaya transportasi bantuan sosial paket bahan pangan satuan tugas provinsi sumatera utara tidak dapat dipertanggungjawabkan (sumut.bpk.go.id). Berdasarkan beberapa fenomena tersebut, penelitian memiliki maksud untuk melihat apakah terdapat variabel- variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan OPD Deli Serdang.

Penelitian ini adalah replika dari Jauhari yang berjudul Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan Standar akuntansi pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu menambah moderasi pada kompetensi Sumber Daya Manusia. Alasan menambah variabel moderasi, karena dengan memoderasi sumber daya manusia akan memperkuat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu variabel Pengawasan dan TI terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini juga didukung dalam penelitian Abdullah yang “berjudul Pemoderasi kompetensi SDM terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan” yang mengungkapkan kompetensi SDM memoderasi Pemahaman Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan diterima dan memberikan nilai tambah terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi pemahaman Pengawasan dibarengi kompetensi SDM yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis mengangkat judul penelitian

“Pengaruh Pengawasan Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris OPD Deli Serdang).”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Ketidakpatuhan terhadap pengawasan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Kurangnya pemahaman para pegawai mengenai teknologi informasi yang mengakibatkan kurang tepatnya dalam penyusunan laporan keuangan.

3. Minimnya sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, Perbaikan kualitas laporan keuangan di pemerintah untuk minimalnya korupsi.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang terjadi, peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pengaruh Pengawasan internal dan Teknologi Informasi Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas dan identifikasi permasalahan. Sehingga dapat dirumuskan dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pengawasan internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ?
2. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ?
4. Apakah kompetensi Sumber daya manusia dapat memoderasi pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan ?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari uraian diatas yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan
2. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia memoderasi pengaruh pengawasan internal daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia memoderasi teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diinginkan dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi yang baik dan berguna sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai evaluasi betapa pentingnya dilakukan pengawasan terhadap pencatatan keuangan, teknologi informasi dalam laporan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan mampu membuat pemerintah daerah dapat memahami konsep-konsep dalam Kinerja laporan Keuangan Daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan serta Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Kualitas laporan keuangan tersebut. Jadi dengan adanya pengaruh pengawasan internal ini diharapkan kedepannya tidak ditemukan lagi adanya aset yang tidak tercatat pada neraca, tidak adanya anggaran-anggaran yang tidak

ditemukan sehingga dengan keberadaan pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi ini serta didukung dengan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang kompeten maka akan membuat laporan keuangan mejadi lebih berkualitas.

2. Untuk Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini, dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman secara langsung mengenai pengawasan keuangan Pemerintahgahan, Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kualitas Laporan keuangan.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan judul yang sama sehingga dapat menemukan kebaharuan yang layak untuk diteliti kedepannya yang berkaitan dengan Pengawasan keuangan pemerintah daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

THE
Character Building
UNIVERSITY